1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juli 2026 secara umum menunjukkan adanya penyesuaian harga musiman. Pada Juli 2026, Kota Tanjungpinang mencatatkan inflasi bulanan (*m-to-m*) sebesar 0,21% dan inflasi tahunan (*y-on-y*) berada pada kisaran 2,85%. Secara *m-to-m*, inflasi didorong oleh peningkatan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok pendidikan seiring mulainya tahun ajaran baru. Komoditas utama penyumbang inflasi Juli 2026 meliputi bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, biaya sekolah, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain cabai merah, kangkung, dan minyak goreng.

Pada Agustus 2026, kondisi harga-harga komoditas di Kota Tanjungpinang melandai. Berdasarkan data pemantauan BPS, Kota Tanjungpinang mengalami deflasi sebesar 0,14% secara *m-to-m*. Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini didorong oleh penurunan harga komoditas *volatile foods*, khususnya cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras pasca puncak permintaan, serta penurunan tarif angkutan udara. Namun demikian, inflasi *y-on-y* Agustus 2026 tercatat sebesar 2,78%.

Pada September 2026, inflasi bulanan (*m-to-m*) Kota Tanjungpinang kembali tercatat sebesar 0,12%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat mulainya transisi cuaca gelombang laut serta kenaikan komoditas emas perhiasan dan biaya pendidikan perguruan tinggi. Komoditas utama penyumbang inflasi September 2026 meliputi cabai merah, ikan selar, emas perhiasan, dan biaya akademi/perguruan tinggi. Sementara itu, komoditas penyumbang deflasi antara lain bawang merah, tarif angkutan udara, dan daging ayam ras.

Pada Triwulan III 2026, tingkat harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Perkembangan rata-rata harga bahan pokok dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KOMODITAS	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Beras Premium (Rp/Kg)	16.500	16.500	16.500
2	Beras SPHP (Rp/Kg)	12.500	12.500	12.500
3	Kedelai Biji Kering (Impor) (Rp/Kg)	11.800	11.800	11.800
4	Bawang Merah (Rp/Kg)	42.500	38.000	36.500
5	Bawang Putih Bonggol (Rp/Kg)	35.000	34.800	35.200
6	Cabai Merah Keriting (Rp/Kg)	48.000	45.000	58.000

7	Daging Sapi Murni (Rp/Kg)	150.000	150.000	150.000
8	Cabai Rawit Merah (Rp/Kg)	62.000	54.000	56.000
9	Daging Ayam Ras (Rp/Kg)	38.500	37.000	37.800
10	Telur Ayam Ras (Rp/Kg)	32.500	32.000	32.000
11	Gula Konsumsi (Rp/Kg)	17.000	17.000	17.000
12	Minyak Goreng Kemasan (Rp/Ltr)	18.500	18.500	18.500
13	Tepung Terigu Curah (Rp/Kg)	10.500	10.500	10.500
14	Minyakita (Rp/Ltr)	15.700	15.700	15.800
15	Tepung Terigu Kemasan (Rp/Kg)	13.500	13.500	13.500
16	Ikan Kembung (Rp/Kg)	38.000	39.000	42.000
17	Ikan Tongkol (Rp/Kg)	30.000	32.000	36.500
18	Garam Konsumsi (Rp/Kg)	10.500	10.500	10.500

Risiko Inflasi Kota Tanjungpinang yang perlu dicermati ke depan:

Risiko Cuaca dan Gangguan Logistik (Musim Utara)

a. Kondisi: Memasuki akhir tahun (pasca September/Triwulan IV), wilayah Kepulauan Riau mulai memasuki "Musim Utara" yang ditandai dengan cuaca ekstrem, angin kencang, dan gelombang laut tinggi. Tanjungpinang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap distribusi bahan pokok melalui jalur laut.
b. Dampak: Terganggunya pelayaran kapal angkut logistik dari Jawa dan Sumatera, serta menurunnya aktivitas nelayan tradisional secara drastis. Hal ini berdampak langsung pada kelangkaan dan lonjakan harga Ikan Segar (seperti ikan selar, tongkol, dan kembung) serta Sayur-mayur (seperti bayam, sawi, dan kangkung) karena pasokan tertahan di pelabuhan.

Ketergantungan Pasokan Antar Daerah (KAD)

a. Kondisi: Lebih dari 80% kebutuhan pangan dan barang kebutuhan pokok di Kota

Tanjungpinang dipasok dari luar provinsi (seperti Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Jawa).

b. Dampak: Keterkaitan harga yang sangat sensitif terhadap kondisi daerah produsen. Jika terjadi kegagalan panen akibat fenomena cuaca ekstrem atau kenaikan biaya operasional di daerah asal, pasokan ke Tanjungpinang akan langsung merosot. Dampaknya adalah fluktuasi harga yang signifikan pada komoditas utama penyumbang inflasi daerah, yaitu Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Telur Ayam Ras.

Tekanan pada Kelompok Transportasi Udara

a. Kondisi: Mobilitas masyarakat Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi sangat bergantung pada moda transportasi udara, sementara jumlah maskapai dan frekuensi penerbangan rute Tanjungpinang (TNJ) – Jakarta (CGK) masih terbatas.
b. Dampak: Terjadinya lonjakan tarif angkutan udara secara tajam (price gouging/scarcity effect), terutama menjelang periode High Season Libur Akhir Tahun serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Hal ini memberikan sumbangan/andil inflasi non-makanan yang dominan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tanjungpinang.

Efek Penyesuaian Harga *Administered Prices*

a. Kondisi: Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penyesuaian tarif energi nonsubsidi, kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT), maupun penyesuaian regulasi tarif BBM dan listrik.
b. Dampak: Kenaikan harga pada komoditas yang diatur pemerintah secara langsung berefek domino. Secara khusus, kenaikan harga Rokok Kretek Mesin (SKM) dan Rokok Putih Mesin (SPM) terbukti memberikan andil inflasi yang bersifat persisten (terus-menerus) di Tanjungpinang, serta berpotensi menaikkan biaya angkutan barang/logistik lokal.

Fenomena *Imported Inflation*

a. Kondisi: Posisi geografis Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta tingginya ketergantungan pada bahan baku komoditas impor ditengah gejolak nilai tukar Rupiah.
b. Dampak: Depresiasi atau pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS/Dolar Singapura secara langsung mendongkrak harga modal/impor. Dampaknya mengerek harga eceran bahan pangan berbasis bahan baku impor seperti Kacang Kedelai (yang berdampak pada kenaikan harga Tahu dan Tempe), Tepung Terigu, serta kenaikan harga barang-barang elektronik dan produk perawatan pribadi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III 2026, identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang meliputi:

Bulan Juli 2026: Masalah Musiman Pendidikan dan Shift Musim Tanam Pangan

a. Tekanan Biaya Pendidikan (Tahun Ajaran Baru): Memasuki tahun ajaran baru, terjadi kenaikan biaya sekolah (uang pangkal/SPP) serta lonjakan permintaan barang perlengkapan sekolah (buku, seragam, dan sepatu). Hal ini memberikan sumbangan inflasi inti (core inflation) yang cukup signifikan dan tidak dapat dihindari secara musiman.
b. Pergeseran Musim Tanam Pasokan Pangan: Terjadi keterlambatan atau pergeseran masa panen komoditas hortikultura (khususnya cabai merah dan cabai rawit) di daerah produsen utama seperti Sumatera Barat dan Jambi. Hal ini mengakibatkan penurunan volume pasokan yang masuk ke Tanjungpinang di tengah tingginya tingkat permintaan masyarakat.

Bulan Agustus 2026: Masalah Tarif Transportasi Udara dan Biaya Distribusi Laut

a. Volatilitas Tarif Tiket Pesawat: Meskipun masa liburan sekolah berakhir, harga tiket penerbangan rute Tanjungpinang (TNJ) – Jakarta (CGK) masih bertahan tinggi akibat terbatasnya frekuensi penerbangan dan jumlah armada maskapai yang beroperasi. Kondisi ini memberi tekanan inflasi pada kelompok Administered Prices.
b. Penyesuaian Biaya Logistik Laut: Terjadi kenaikan biaya operasional pada moda pengangkutan kapal antarpulau yang memicu kenaikan ongkos angkut barang dari pelabuhan pengirim ke Pelabuhan Tanjungpinang, sehingga berdampak pada harga jual eceran komoditas non-pangan dan barang manufaktur.

Bulan September 2026: Masalah Cuaca Gelombang Laut dan Tekanan Pangan Pokok

a. Kelangkaan Ikan Segar Lokal (Transisi Musim Utara): Mulai terasanya dampak transisi perubahan cuaca dan peningkatan gelombang laut di perairan Kepulauan Riau yang menyulitkan nelayan tradisional untuk melaut. Ketersediaan stok ikan segar lokal (seperti ikan selar, ikan tongkol, dan ikan tamban) di pasar rakyat seperti Pasar Bintan Center menipis, memicu lonjakan harga yang tajam.
b. Tekanan Harga Beras dan Pasokan Luar: Merambatnya tren kenaikan harga beras di tingkat nasional ke daerah akibat belum masukknya musim panen raya di wilayah Jawa dan Sumatera Selatan, yang diperparah dengan ketergantungan penuh Tanjungpinang pada pasokan beras luar daerah.

Selain itu, secara umum yang menjadi permasalahan terkait upaya pengendalian inflasi diantaranya:

Permasalahan	Detail Dampak

Ketergantungan Eksternal	Lebih dari 80% pasokan pangan diimpor dari luar Kepri. Hambatan kecil pelabuhan langsung berdampak pada harga eceran.
Struktur Pasar Oligopolistik	Terbatasnya agen besar/distributor utama komoditas rentan memicu volatilitas harga di tingkat pedagang eceran.
Kapasitas Produksi Lokal Rendah	Produksi pertanian lokal di Bintan dan Tanjungpinang belum mencukupi kebutuhan komoditas *volatile foods* secara mandiri.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang pada Triwulan III Tahun 2026 diimplementasikan melalui strategi konkrit **4K** guna meredam laju inflasi, khususnya dari kelompok komoditas bergejolak (*volatile foods*) dan barang kebutuhan pokok:

Menjaga Keterjangkauan Harga (*Price Affordability*)

a. Pemantauan Rutin Pasar & Distributor: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang secara konsisten melakukan inspeksi dan pemantauan harga 2 kali seminggu di pasar tradisional (seperti Pasar Bintan Center dan Pasar Bintan Perdana) serta pemantauan stok di tingkat distributor rutin 1 kali seminggu. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini (early warning system) fluktuasi harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, dan cabai.
b. Intervensi Pasar Terjangkau: Mengoptimalkan peran Gerai Pangan dan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) berkala untuk memangkas rantai pasok. Melalui kegiatan ini, bahan pokok dipasarkan langsung kepada masyarakat dengan harga di bawah pasar eceran guna menjaga daya beli masyarakat.

Menjaga Ketersediaan Pasokan (*Supply Availability*)

a. Penguatan Produksi Lokal: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang memberikan pendampingan teknis dan sarana prasarana pertanian kepada Kelompok Tani (Poktan) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan. Fokus utamanya pada peningkatan luas tanam dan produktivitas komoditas hortikultura lokal seperti cabai merah, cabai rawit, dan sayur-mayur.
b. Pengawasan HET & Stok: Mengawasi kepatuhan pedagang dan distributor terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas yang diatur pemerintah (seperti Beras SPHP, Minyakita, dan gula pasir) guna memastikan pasokan tersedia secara adil dan tidak terjadi penimbunan.

Menjaga Kelancaran Distribusi (*Distribution Efficiency*)

Koordinasi Jalur Logistik Pelabuhan: Mengingat Tanjungpinang merupakan wilayah

a.
kepulauan, TPID membangun komunikasi intensif dengan otoritas pelabuhan (Pelindo, KSOP) dan asosiasi logistik untuk memprioritaskan bongkar muat bahan pangan pokok dari kapal angkutan laut.
b. Sinergi Distributor & Agen: Menggalang koordinasi berkala bersama para distributor besar di Tanjungpinang untuk memetakan proyeksi stok pasokan, kelancaran pasokan antar daerah (KAD), serta mengantisipasi potensi kendala pengiriman akibat dinamika cuaca di laut.

Komunikasi Efektif (*Effective Communication*)

a. Rapat Koordinasi Rutin TPID: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rutin TPID Kota Tanjungpinang dan High Level Meeting (HLM) secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah bersama Bank Indonesia, BPS, dan instansi vertikal terkait.
b. Manajemen Ekspektasi Masyarakat: Menerbitkan Siaran Pers dan konten edukasi belanja bijak seusai rapat evaluasi TPID atau pemantauan lapangan. Langkah ini krusial untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat dan mencegah tindakan pembelanjaan berlebihan (panic buying) saat terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang pada Triwulan III Tahun 2026 secara terperinci mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga (*Price Affordability*)

a. Evaluasi Gerai Pangan & Operasi Pasar: Efektivitas Gerai Pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam menekan gejolak harga volatile foods cukup dirasakan oleh masyarakat setempat. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena lokasi Gerai Pangan yang relatif terpusat dan agak jauh dari pemukiman padat di wilayah Tanjungpinang Timur serta pasar induk (Pasar Bintan Center). Hal ini menyebabkan dampaknya terhadap transmisi penurunan harga eceran di pasar tradisional belum bersifat menyeluruh.
b. Pengawasan HET di Lapangan: Pemantauan harga rutin yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berjalan konsisten (2 kali seminggu). Kendati demikian, masih ditemukan fluktuasi harga eceran pada komoditas Minyakita dan beras medium di tingkat pedagang eceran kecil yang sedikit melebihi HET akibat tingkat rantai pasok yang terlalu panjang sebelum sampai ke konsumen akhir.

Ketersediaan Pasokan (*Supply Availability*)

a. Kapasitas Produksi Pertanian Lokal: Program pendampingan kelompok tani dan

sekolah lapangan oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan telah meningkatkan hasil panen beberapa komoditas sayuran (seperti kangkung, bayam, dan sawi). Namun, untuk komoditas sensitif penyumbang inflasi utama seperti cabai merah dan bawang merah, tingkat produksi lokal Tanjungpinang dan Bintan baru mampu memenuhi kurang dari 20% kebutuhan daerah.

b. Ketahanan Stok Distributor: Ketersediaan stok pangan pokok di tingkat distributor Tanjungpinang selama Triwulan III secara umum berada dalam kondisi aman dan tidak terjadi kelangkaan. Meski begitu, ketiadaan cadangan pangan daerah (buffer stock) milik pemerintah daerah membuat ketergantungan penuh pada pasokan swasta/distributor cukup berisiko saat terjadi gangguan panen di daerah asal (Sumatera Barat dan Jawa).

Kelancaran Distribusi (*Distribution Efficiency*)

a. Kinerja Logistik Jalur Laut: Pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam alur logistik bahan pangan pokok melalui jalur laut berjalan relatif baik selama Juli–Agustus. Namun, memasuki akhir September (transisi menuju Musim Utara), terjadi peningkatan biaya operasional dan efisiensi waktu bongkar muat komoditas akibat dinamika cuaca laut.
b. Rantai Distribusi Lokal: Masih kuatnya struktur pasar oligopolistik di mana pasokan komoditas tertentu (seperti telur ayam ras dan daging ayam ras) dikuasai oleh beberapa agen/distributor besar saja. Kondisi ini memicu keterlambatan penyesuaian harga di tingkat eceran saat harga di tingkat produsen luar daerah sebenarnya sudah mengalami penurunan.

Komunikasi Efektif (*Effective Communication*)

a. Frekuensi dan Kepemimpinan Rapat TPID: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rutin TPID Kota Tanjungpinang telah berjalan sangat konsisten setiap bulannya. Kehadiran dan kepemimpinan langsung dari Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah dalam memimpin koordinasi mempercepat pengambilan keputusan teknis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
b. Edukasi dan Transparansi Informasi: Publikasi siaran pers dan transparansi data perkembangan harga harian pasca-monitoring telah membantu menenangkan ekspektasi masyarakat. Hambatan kecil yang perlu ditingkatkan adalah jangkauan edukasi "Belanja Bijak" yang belum sepenuhnya masif hingga ke tingkat kelurahan/RT/RW untuk mencegah panic buying pada komoditas spesifik saat diterpa isu cuaca buruk.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pemetaan masalah pada Triwulan III dan potensi risiko menghadapi Triwulan IV 2026 (termasuk ancaman Musim Utara serta persiapannya menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru), TPID Kota Tanjungpinang direkomendasikan untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terukur berikut:

Penguatan Mitigasi Logistik & Distribusi (Fokus Dampak Musim Utara)

a. Optimalisasi Fasilitas Cold Storage: Mewajibkan dan memfasilitasi Dinas Perikanan bersama BUMD/pelaku usaha lokal untuk memaksimalkan kapasitas penyerapan cold storage pada akhir September/awal Oktober. Penyetokan difokuskan pada Ikan Segar Bebas Komplikasi (seperti ikan selar dan tongkol) serta Daging Ayam Ras saat harga terjangkau, untuk disalurkan ke pasar saat gelombang laut tinggi menghambat nelayan melaut.
b. Aktivasi Skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA): Menyiapkan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) atau dana insentif daerah untuk mensubsidi biaya transportasi komoditas volatil (cabai, bawang, dan telur) dari pelabuhan asal (Jambi, Jakarta, atau Sumbar) menuju Tanjungpinang jika terjadi lonjakan biaya angkut laut akibat cuaca ekstrem.

Perluasan dan Efektivisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

a. Kontrak Dagang B2B (Business-to-Business): Memfasilitasi kesepakatan B2B antara distributor utama di Tanjungpinang dengan kelompok tani/gapoktan di daerah penyangga surplus, seperti sentra cabai di Kabupaten Sleman/Kulon Progo dan sentra beras di Sumatera Selatan.
b. Sinkronisasi Jadwal Tanam dengan Kabupaten Bintan: Melakukan koordinasi lintas TPID wilayah Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang & Kabupaten Bintan) untuk mengatur pola dan jadwal tanam hortikultura. Hal ini guna memastikan ketersediaan pasokan lokal tidak mengalami kekosongan bersamaan saat pasokan dari luar pulau terhenti.

Intervensi Pasar Terukur dan Terdistribusi Menjelang HBKN (Nataru)

a. Gerakan Pangan Murah (GPM) Keliling/Mobile: Mengubah strategi Operasi Pasar/GPM dari titik statis menjadi armada keliling menggunakan kendaraan operasional. Penyaluran diprioritaskan menjangkau wilayah pemukiman padat yang jauh dari pasar induk, seperti di kawasan Tanjungpinang Timur dan Tanjungpinang Barat.
b. Inspeksi dan Pengawasan Gudang Distributor: Melakukan pemantauan dan pengawasan mendadak (sidak) secara berkala oleh Satgas Pangan daerah ke gudang-gudang distributor utama untuk memastikan stok beras, minyak goreng, dan gula pasir berada pada batas aman serta mencegah indikasi penimbunan (hoarding).

Massifikasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

a. Program Mandiri Pangan Kelompok Wanita Tani (KWT): Mengalokasikan bantuan bibit cabai dan bawang merah dalam polibag beserta pupuk organik kepada KWT, dasawisma, dan rumah tangga di seluruh kelurahan untuk meredam permintaan pasar pada komoditas volatile foods.
b. Kampanye Edukasi Alternatif Konsumsi: Melakukan edukasi publik melalui media sosial dan media lokal mengenai pemanfaatan produk pangan olahan/ikan beku

(frozen fish) berkualitas sebagai substitusi saat pasokan ikan segar lokal terganggu akibat cuaca buruk.

Koordinasi Pemprov & Kemenhub Terkait Tarif Angkutan Udara

Lobi Penambahan Armada dan Frekuensi (*Extra Flight*): Menyampaikan rekomendasi resmi bersama Pemprov Kepri kepada Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan untuk menambah jadwal penerbangan (*extra flight*) rute Tanjungpinang (TNJ) – Jakarta (CGK) menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Langkah ini krusial guna mengendalikan lonjakan harga tiket pesawat yang sering memberikan andil inflasi tinggi pada kelompok transportasi.